



Pengembangan Filsafat Ilmu Dalam Revitalisasi Pendidikan Politik di Indonesia

St. Ika Noerwulan Fraja^{1*}, Fendi Setyawan², M. Arief Amrullah², Fitriyah¹, Moh. Wakid¹

¹ Faculty of Law, University of Bahaudin Mudhary Madura, Sumenep, Indonesia

² Faculty of Law, University of Jember, Jember, Indonesia

*Corresponding author email: ikanoerwulanfraja@unibamadura.ac.id

Article Info

Article history:

Received January 21, 2026

Approved March 15, 2026

Keywords:

Philosophy of Science, Critical Epistemology, Political Education, Critical Consciousness, Democracy

ABSTRACT

The development of the philosophy of science plays a strategic role in reconstructing the paradigm of political education in Indonesia, which has long tended to be formalistic and ceremonial. Ideally, political education serves as a space for cultivating citizens' critical awareness. Through the perspective of epistemology, knowledge is understood as non-neutral and inherently linked to social interests and power relations. This study employs a qualitative method using a library research approach by examining the works of Jurgen Habermas, Paulo Freire, and relevant literature on the philosophy of science and political education in Indonesia. The analysis is conducted using a descriptive–reflective technique to explore the relationship between the development of the philosophy of science and the revitalization of political education. The findings show that critical epistemology requires a paradigmatic shift from a positivistic model of political education toward a dialogical and participatory model. Political education should not merely convey political facts but encourage citizens to understand the reasons and values underlying political structures. This paradigm positions political education as an emancipatory process that forms critical, rational, and empowered citizens. Thus, the development of the philosophy of science through critical epistemology serves as an essential foundation for constructing a more reflective, dialogical, and liberating political education, ultimately strengthening democratic quality in Indonesia.

ABSTRAK

Pengembangan filsafat ilmu memiliki peran strategis dalam membangun kembali paradigma pendidikan politik di Indonesia yang selama ini cenderung bersifat formal dan seremonial. Pendidikan politik idealnya berfungsi sebagai ruang pembentukan kesadaran kritis warga negara. Melalui pendekatan epistemologi kritis, pengetahuan dipahami tidak netral, tetapi selalu terkait dengan kepentingan sosial dan relasi kekuasaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), yaitu menelaah karya-karya filosofis Jurgen Habermas, Paulo Freire, serta literatur terkait filsafat ilmu dan pendidikan politik di Indonesia. Analisis dilakukan secara deskriptif-reflektif untuk mengungkap hubungan antara pengembangan filsafat ilmu dan revitalisasi pendidikan politik. Hasil kajian menunjukkan bahwa epistemologi kritis menuntut perubahan paradigma pendidikan politik dari model positivistik menuju model dialogis dan partisipatoris. Pendidikan politik tidak hanya menjelaskan fakta politik, tetapi mendorong masyarakat untuk memahami alasan dan nilai yang melandasi struktur politik tersebut. Dengan paradigma ini, pendidikan politik berfungsi sebagai proses pembebasan yang

membentuk warga negara kritis, rasional, dan berdaya. Dengan demikian, pengembangan filsafat ilmu melalui epistemologi kritis menjadi landasan penting dalam membangun pendidikan politik yang lebih reflektif, dialogis, dan membebaskan serta mampu memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia.

Copyright © 2026, The Author(s).
This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Fraja, S. I. N., Setyawan, F., Amrullah, M. A., Fitriyah, F., & Wakid, M. (2026). Pengembangan Filsafat Ilmu Dalam Revitalisasi Pendidikan Politik di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 7(1), 1008–1015. <https://doi.org/10.55681/jige.v7i1.5187>

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan saat ini membawa banyak perubahan dalam kehidupan manusia, tidak hanya di bidang teknologi, tetapi juga dalam cara kita memahami realitas sosial dan politik (Bunga, 2025). Dalam hal ini, filsafat ilmu punya peran penting. Filsafat ilmu bukan cuma membahas bagaimana manusia memperoleh pengetahuan, tetapi juga mempertanyakan untuk apa pengetahuan itu digunakan dan siapa yang diuntungkan oleh pengetahuan tersebut. Jadi, filsafat ilmu tidak hanya soal teori, tetapi juga soal nilai dan tanggung jawab sosial dari ilmu pengetahuan itu sendiri (Suhairi, 2023).

Filsafat ilmu membantu manusia agar tidak sekadar memanfaatkan ilmu untuk kepentingan teknis atau kekuasaan, tapi juga untuk membangun kesadaran. Dalam konteks kehidupan politik, pendekatan filsafat ilmu dibutuhkan supaya pengetahuan dan pendidikan politik tidak terjebak dalam tujuan-tujuan pragmatis, seperti mempertahankan kekuasaan atau mencari dukungan politik semata. Melalui pemahaman filsafat ilmu, ilmu pengetahuan bisa diarahkan agar bermanfaat untuk kepentingan masyarakat luas dan memperkuat demokrasi.

Di Indonesia, pendidikan politik punya peran besar dalam membentuk warga negara yang sadar hak dan kewajibannya, berpikir kritis terhadap kebijakan publik, serta mau ikut berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi (Widiyanto & Nufus, 2023). Idealnya, pendidikan politik menjadi proses pembelajaran yang membuat masyarakat melek politik dan berani menyuarakan pendapatnya. Namun, kenyataannya pendidikan politik di Indonesia sering kali masih bersifat seremonial dan elitis. Kegiatan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik, lembaga pemilu, atau bahkan lembaga pendidikan, sering hanya menjadi ajang sosialisasi satu arah tanpa ruang dialog. Akibatnya, masyarakat tetap pasif, mudah dipengaruhi isu, dan kurang reflektif terhadap situasi politik di sekitarnya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan politik kita masih terjebak pada paradigma lama yang sifatnya positivistik, yaitu pandangan bahwa pengetahuan bersifat netral dan bisa ditransfer begitu saja dari yang tahu ke yang tidak tahu. Dalam paradigma seperti ini, rakyat dianggap sebagai objek yang hanya menerima informasi, bukan sebagai subjek yang ikut membangun pengetahuan dan kesadaran politiknya sendiri. Padahal, kalau kita ingin masyarakat menjadi kritis dan berdaya, paradigma pendidikan seperti ini perlu diubah.

Di sinilah pentingnya epistemologi kritis, yaitu cabang dari filsafat ilmu yang menolak pandangan bahwa pengetahuan itu netral (Handrianto, 2021). Epistemologi kritis memandang bahwa pengetahuan selalu berhubungan dengan kepentingan sosial dan kekuasaan. Tokoh seperti Jurgen Habermas menjelaskan bahwa setiap pengetahuan selalu punya tujuan tertentu apakah untuk menguasai, untuk memahami, atau untuk membebaskan (Saidi, 2015). Menurut

Habermas, ilmu seharusnya tidak hanya digunakan untuk kepentingan teknis atau praktis, tetapi juga untuk emansipasi, yaitu membebaskan manusia dari penindasan dan dominasi.

Pemikiran ini sejalan dengan gagasan Paulo Freire, seorang tokoh pendidikan asal Brasil. Freire dalam bukunya *Pedagogy of the Oppressed* menjelaskan bahwa pendidikan harus bersifat dialogis, yaitu adanya proses belajar dua arah antara pendidik dan peserta didik (Kusumawati, 2024). Tujuan pendidikan bukan sekadar memberikan pengetahuan, tapi membangkitkan kesadaran kritis agar masyarakat bisa berpikir mandiri dan memperjuangkan perubahan sosial.

Kalau gagasan ini diterapkan dalam konteks Indonesia, maka revitalisasi pendidikan politik seharusnya tidak berhenti pada penyampaian informasi tentang sistem pemerintahan, partai politik, atau pemilu. Pendidikan politik harus diarahkan untuk melatih masyarakat berpikir kritis, memahami persoalan politik dari berbagai sudut pandang, dan mampu menilai kebijakan secara rasional. Artinya, pendidikan politik perlu menjadi sarana pembebasan, bukan alat indoktrinasi.

Revitalisasi pendidikan politik yang berlandaskan epistemologi kritis juga menuntut keterlibatan berbagai pihak seperti lembaga pendidikan, media, lembaga penyelenggara pemilu, hingga partai politik agar lebih terbuka terhadap dialog. Masyarakat harus diberi ruang untuk bertanya, berdiskusi, dan mengkritisi tanpa takut dianggap menentang. Dengan begitu, pendidikan politik bisa menjadi wadah pembentukan warga negara yang cerdas, kritis, dan partisipatif.

Selain itu, pendekatan filsafat ilmu dalam pendidikan politik juga penting untuk memperkuat kesadaran hukum dan demokrasi di Indonesia. Negara hukum yang demokratis tidak cukup hanya dengan aturan yang baik, tetapi juga membutuhkan warga negara yang memahami dasar dan nilai-nilai dari hukum dan politik itu sendiri. Di sinilah filsafat ilmu dan epistemologi kritis bisa memberikan arah agar pendidikan politik tidak hanya menjelaskan “apa yang ada”, tapi juga “mengapa harus begitu” dan “bagaimana seharusnya”.

Dengan dasar pemikiran tersebut, maka pengembangan filsafat ilmu melalui epistemologi kritis dapat menjadi landasan penting dalam upaya revitalisasi pendidikan politik di Indonesia. Pendekatan ini diharapkan mampu membangun pendidikan politik yang lebih reflektif, dialogis, dan membebaskan sehingga masyarakat Indonesia tidak lagi menjadi penonton politik, melainkan aktor yang sadar, rasional, dan berdaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Permasalahan

Berkenaan dengan latar belakang di atas sebagaimana tercantum, Artikel ini akan mengkaji tiga isu utama yang termasuk dalam rumusan masalah sebagaimana berikut:

- 1). Bagaimana Hubungan antara Pengembangan Filsafat Ilmu dengan Upaya Revitalisasi Pendidikan Politik di Indonesia?
- 2). Bagaimana Penerapan Epistemologi Kritis dapat Memperkuat Pendidikan Politik agar mampu membentuk Warga Negara yang Kritis dan Partisipatif?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan, karena tujuan utama penelitian adalah menelaah gagasan-gagasan filosofis tentang filsafat ilmu, epistemologi kritis, dan pendidikan politik. Sumber data yang digunakan terdiri dari literatur sekunder, termasuk buku-buku filsafat, artikel jurnal, serta kajian akademik mengenai pendidikan politik di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui pembacaan mendalam dan penelusuran literatur yang relevan.

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif, reflektif, dan kritis. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep utama, sementara analisis reflektif dan kritis digunakan untuk mengkaji relevansi teori terhadap konteks pendidikan politik di Indonesia. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menghasilkan pemahaman filosofis yang dapat menjadi dasar bagi revitalisasi pendidikan politik yang lebih dialogis dan berorientasi pada pembentukan kesadaran kritis warga negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian Terdahulu

Kusumawati (2024) yang menelaah teori belajar kognitif Freire secara kritis terhadap sistem pendidikan Indonesia secara umum, jurnal ini berbeda menerapkan pemikiran Freire pada pendidikan politik saja, menjadikannya lebih kontekstual terhadap isu demokrasi dan kekuasaan politik daripada pendidikan holistik. Sementara Labaso & Hestiana (2021) membahas teori pembelajaran humanisme Habermas dalam pendidikan Islam, jurnal ini berbeda memperluasnya ke ranah politik sekuler di Indonesia, tanpa fokus religius, sehingga lebih menyoroti relasi kekuasaan sosial-politik daripada humanisme keagamaan.

Mochtar & Ayun (2024) mengeksplorasi peran filsafat ilmu untuk pola pikir kritis siswa di era AI, yang bersifat umum dan teknologi-oriented, sedangkan jurnal ini membedakannya dengan aplikasi langsung pada pendidikan politik untuk emansipasi warga negara dari dominasi, bukan sekadar kritis individu terhadap AI. Prayugo & Prayitno (2022) menganalisis pendidikan politik sebagai proses kesadaran politik dan kewarganegaraan, mirip namun lebih deskriptif; jurnal ini unggul dengan fondasi filsafat ilmu kritis Habermas-Freire untuk paradigma revitalisasi, menjadikannya lebih reflektif dan emansipatoris.

Saidi (2015) membahas pembagian epistemologi Habermas dan implikasinya pada metodologi penelitian sosial-budaya, yang metodologis semata, berbeda dari jurnal ini yang menerapkannya praktis pada pendidikan politik Indonesia untuk mengubah praktik dari seremonial ke pembebasan, melampaui analisis teoritis semata. Secara keseluruhan, kelima referensi tersebut bersifat parsial atau sektoral, sementara jurnal ini menawarkan sintesis komprehensif untuk konteks politik Indonesia kontemporer.

Hubungan antara Pengembangan Filsafat Ilmu dengan Upaya Revitalisasi Pendidikan Politik di Indonesia

Filsafat ilmu merupakan refleksi mendalam tentang dasar, metode, dan tujuan ilmu pengetahuan (Setiawan et al, 2025). Dalam konteks sosial dan politik, filsafat ilmu berfungsi untuk menguji bagaimana ilmu dan pengetahuan digunakan apakah untuk kepentingan kemanusiaan atau justru untuk memperkuat dominasi kekuasaan. Oleh karena itu, pengembangan filsafat ilmu tidak bisa dilepaskan dari upaya membangun sistem pengetahuan yang lebih humanis dan membebaskan.

Ketika kita bicara tentang pendidikan politik di Indonesia, persoalannya tidak hanya berkaitan dengan rendahnya literasi politik masyarakat, tetapi juga dengan paradigma pengetahuan yang melandasi praktik pendidikan politik itu sendiri (Bayti et al, 2020). Selama ini, pendidikan politik cenderung didekati secara positivistic yakni melihat pengetahuan politik sebagai sesuatu yang netral, tetap, dan bisa ditransfer dari atas ke bawah. Dalam pendekatan seperti ini, masyarakat dianggap sebagai objek pembelajaran yang hanya menerima informasi tanpa ruang untuk berdialog atau mengkritisi.

Padahal, menurut pandangan filsafat ilmu, terutama dalam tradisi kritis, pengetahuan tidak pernah netral. Ilmu selalu terkait dengan nilai, kepentingan, dan konteks sosial tertentu. Artinya, kalau pendidikan politik masih mengabaikan aspek reflektif dan kritis dari pengetahuan, maka yang terjadi bukan pembebasan, melainkan pengulangan pola dominasi politik lama.

Dengan pengembangan filsafat ilmu, pendidikan politik bisa diarahkan untuk menjadi ruang refleksi kritis tempat di mana peserta didik (baik mahasiswa, masyarakat umum, maupun kader politik) tidak hanya mempelajari sistem politik, tetapi juga mempertanyakan nilai-nilai, kepentingan, dan struktur kekuasaan yang ada di baliknya. Proses ini membuat pendidikan politik tidak lagi sekadar alat sosialisasi politik, tetapi menjadi sarana membangun kesadaran kritis dan tanggung jawab sosial warga negara.

Sebagai contoh, dalam konteks demokrasi Indonesia, pendidikan politik yang berlandaskan filsafat ilmu dapat menumbuhkan pemahaman bahwa politik bukan sekadar urusan perebutan kekuasaan, tetapi tentang bagaimana mewujudkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan. Dengan demikian, filsafat ilmu berfungsi sebagai Kompas bagi pelaksanaan pendidikan politik.

Secara historis, pendidikan politik di Indonesia sering kali dimanfaatkan sebagai alat legitimasi oleh pihak yang berkuasa. Pada masa Orde Baru misalnya, pendidikan politik dijalankan secara top-down melalui lembaga formal dengan fokus pada pembentukan loyalitas terhadap negara dan pemerintah, bukan pada penguatan kesadaran kritis warga negara. Dampaknya, generasi masyarakat menjadi terbiasa menerima informasi politik tanpa sikap reflektif atau kritis.

Pengembangan filsafat ilmu dapat membantu mengubah paradigma lama tersebut dengan pendekatan reflektif dan analitis (Mochtar & A'yun, 2024). Filsafat ilmu mengajarkan bahwa setiap bentuk pengetahuan, termasuk pengetahuan politik, harus diuji dari segi rasionalitas, moralitas, dan kemanfaatan sosialnya. Artinya, ketika kita membicarakan revitalisasi pendidikan politik, yang dibutuhkan bukan hanya perbaikan kurikulum atau program, tetapi juga pergeseran cara berpikir (*mindset*) terhadap hakikat pendidikan politik itu sendiri.

Pengembangan filsafat ilmu mendorong adanya pendidikan politik yang bersifat dialogis, dimana masyarakat tidak lagi ditempatkan sebagai objek, tetapi sebagai subjek pengetahuan. Mereka tidak hanya diberi informasi tentang pemilu atau sistem pemerintahan, melainkan diajak untuk berpikir dan berdiskusi mengenai keadilan sosial, kebijakan publik, hingga tanggung jawab moral sebagai warga negara. Dengan cara ini, pendidikan politik akan menjadi ruang yang mendorong pemberdayaan intelektual dan moral.

Dengan demikian, hubungan antara pengembangan filsafat ilmu dan revitalisasi pendidikan politik di Indonesia sangat erat. Filsafat ilmu menjadi fondasi yang memastikan bahwa pendidikan politik tidak kehilangan arah nilai, serta mampu menghadirkan pembelajaran yang membangun kesadaran kritis, partisipatif, dan emansipatoris di kalangan warga negara.

Penerapan Epistemologi Kritis dapat Memperkuat Pendidikan Politik agar mampu membentuk Warga Negara yang Kritis dan Partisipatif.

Epistemologi kritis berangkat dari pemikiran bahwa pengetahuan tidak pernah netral dan selalu berhubungan dengan kekuasaan serta kepentingan tertentu. Salah satu tokoh sentralnya, Jurgen Habermas, membedakan tiga kepentingan dasar dalam ilmu pengetahuan:

- 1). Teknis, pengetahuan yang digunakan untuk mengontrol atau menguasai alam dan manusia;

- 2). Praktis, pengetahuan yang digunakan untuk memahami dan berkomunikasi;
- 3). Emansipatoris, pengetahuan yang bertujuan membebaskan manusia dari dominasi dan ketidaktahuan (Labaso & Hestiana, 2021).

Dalam konteks pendidikan politik, epistemologi kritis menempatkan pembelajaran politik sebagai proses emansipasi, bukan indoktrinasi (Prayugo & Prayitno, 2022). Artinya, pendidikan politik harus membebaskan masyarakat dari ketergantungan pada narasi tunggal, seperti narasi partai atau penguasa, dan memberi ruang bagi masyarakat untuk berpikir mandiri. Prinsip ini juga sejalan dengan pemikiran Paulo Freire, yang menekankan pentingnya pendekatan dialogis. Menurut Freire, pendidikan sejati adalah proses “menyadarkan” di mana peserta didik menyadari struktur ketidakadilan sosial dan berani mengambil peran untuk mengubahnya.

Dengan menggunakan pendekatan epistemologi kritis, pendidikan politik dapat diarahkan pada pembentukan kesadaran kritis warga negara, bukan sekadar pemahaman prosedural tentang politik. Misalnya, masyarakat tidak hanya tahu cara mencoblos dalam pemilu, tetapi juga memahami bagaimana kebijakan publik dibuat, bagaimana kekuasaan bekerja, dan bagaimana mereka bisa ikut mengontrolnya. Pendidikan politik berbasis epistemologi kritis akan menumbuhkan kemampuan analisis sosial, kesadaran, dan sikap partisipatif yang lebih kuat.

Selain itu, penerapan epistemologi kritis juga menuntut adanya perubahan metode pendidikan politik. Selama ini pendidikan politik sering dilakukan secara satu arah (ceramah, sosialisasi, atau seminar). Dalam epistemologi kritis, metode seperti itu dianggap tidak cukup, karena menempatkan masyarakat sebagai penerima pasif. Sebagai gantinya, pendekatan partisipatoris dan dialogis lebih diutamakan, misalnya melalui forum diskusi publik, simulasi kebijakan, media digital interaktif, atau pendidikan politik berbasis komunitas.

Pendekatan semacam ini memungkinkan masyarakat untuk mengaitkan pengetahuan politik dengan realitas hidup mereka sendiri seperti masalah kemiskinan, lingkungan, atau korupsi sehingga pendidikan politik benar-benar menjadi bagian dari kehidupan sosial, bukan sekadar teori.

Penerapan epistemologi kritis dalam pendidikan politik memiliki beberapa implikasi penting bagi pembangunan masyarakat demokratis di Indonesia. Pertama, membangun kesadaran reflektif dan partisipatif. Pendidikan politik yang berbasis epistemologi kritis mendorong masyarakat untuk berpikir reflektif terhadap fenomena sosial-politik. Mereka tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mempertanyakan sumber dan tujuan dari informasi tersebut. Kesadaran semacam ini penting untuk membentuk masyarakat yang tidak mudah terpengaruh hoaks, propaganda, atau politik identitas yang manipulatif.

Kedua, menggeser orientasi pendidikan politik dari indoktrinasi ke pemberdayaan. Dalam epistemologi kritis, pendidikan bukan alat kekuasaan, melainkan alat pembebasan. Partai politik, lembaga penyelenggara pemilu, maupun lembaga pendidikan tinggi seharusnya menjadikan pendidikan politik sebagai ruang dialog antarwarga negara, bukan sekadar sosialisasi kebijakan. Pendidikan politik yang demikian bisa menumbuhkan rasa memiliki terhadap proses politik dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam demokrasi.

Ketiga, meningkatkan integrasi antara teori dan praktik. Selama ini, banyak program pendidikan politik yang hanya berhenti pada tataran wacana tanpa memberi pengalaman langsung kepada masyarakat. Epistemologi kritis mengajarkan tindakan yang berlandaskan refleksi kritis. Misalnya, pelibatan masyarakat dalam forum musyawarah desa, pengawasan

pemilu, atau pelatihan advokasi kebijakan publik bisa menjadi bentuk konkret dari penerapan pendidikan politik kritis.

Keempat, menumbuhkan budaya politik yang rasional dan etis. Dengan epistemologi kritis, masyarakat dilatih untuk menilai kebijakan dan perilaku politik berdasarkan argumen rasional dan nilai moral, bukan hanya fanatisme atau sentimen kelompok. Hal ini penting agar demokrasi tidak berhenti pada formalitas pemilu, tetapi benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat yang rasional, adil, dan bermartabat.

Dengan demikian, epistemologi kritis dapat menjadi landasan dalam memperkuat pendidikan politik di Indonesia. Ia menawarkan cara berpikir baru yang menekankan kebebasan berpikir dan kritis. Melalui penerapan epistemologi kritis, pendidikan politik dapat benar-benar berfungsi sebagai alat emansipasi warga negara membebaskan mereka dari ketidaktahuan, manipulasi, dan dominasi kekuasaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa filsafat ilmu memiliki peran penting dalam mengarahkan kembali pendidikan politik di Indonesia agar tidak hanya bersifat formal dan informatif, tetapi lebih reflektif, kritis, dan partisipatif. Pendidikan politik tidak lagi sekadar menyampaikan pengetahuan tentang sistem politik, melainkan juga membentuk kesadaran dan tanggung jawab warga negara. Selain itu, penerapan epistemologi kritis memberikan perspektif bahwa pengetahuan tidak bersifat netral, sehingga pendidikan politik perlu diarahkan sebagai proses pembebasan yang mendorong masyarakat berpikir kritis dan aktif dalam kehidupan demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya dari berbagai pihak, seperti perguruan tinggi, pemerintah, partai politik, dan masyarakat, untuk mengembangkan model pendidikan politik yang lebih dialogis, memperkuat literasi politik, serta mengintegrasikan nilai-nilai filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Dengan demikian, pendidikan politik diharapkan mampu menjadi sarana pembentukan warga negara yang kritis, rasional, dan berdaya dalam menghadapi dinamika politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bayti et al. (2020). *Gagasan Millenial & Generasi Z Untuk Indonesia Emas 2045*. Fianosa Publishing.
- Bunga, A. (2025). *Perubahan Sosial Pada Masyarakat Digital*. <https://umsb.ac.id/berita/index/1590-perubahan-sosial-pada-masyarakat-digital>.
- Handrianto, B. (2021). *Ilmu Pengetahuan Tidak Netral*. <https://mediadakwah.id/ilmu-pengetahuan-tidak-netral/>.
- Kusumawati, N. A. (2024). *Telaah Kritis Teori Belajar Kognitif Paulo Freire Terhadap Sistem Pendidikan di Indonesia*. Seminar Nasional HMP UNS.
- Labaso, S. & Hestiana, R. (2021). Pengembangan Teori Pembelajaran Humanisme menurut Jurgen Habermas serta Relevansinya Dalam Pendidikan Islam. *Early Childhood Islamic Education Journal*, 2(1), 44.
- Mochtar, N. & A'yun D. Q. &. (2024). Peran Filsafat Dalam Mengembangkan Pola Pikir Kritis Siswa Di Era Ai. *JMA*, 2(12), 8.

- Prayugo, A. & Prayitno, R. B. (2022). Pendidikan Politik Sebagai Proses Belajar Membentuk Kesadaran Politik dan Peran Kewarganegaraan. *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 3(3), 430.
- Saidi, A. (2015). Pembagian Epistemologi Habermas Dan Implikasinya Terhadap Metodologi Penelitian Sosial-Budaya. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 17(2).
- Setiawan et al. (2025). Filsafat Ilmu: Ruang Lingkup Metode dan Tujuan. *AJSH*, 5(2), 2276.
- Suhairi, S. (2023). Memahami Konsep Filsafat Ilmu. *HUMANITIS: Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis*, 1(6), 595.
- Widiyanto, D., & Nufus, A. B. (2023). *Pendidikan Demokrasi Untuk Generasi Muda*. Pustaka Rumah C1nta.